



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR
Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor : 112, Makassar
Telepon/Faximile: (0411) 4665140, HP: 082193089696

Laman: www.bhpmakassar.kemenkumham.go.id Surel: bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id

5 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sul Sel
Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Di_

Makassar

SURAT PENGANTAR

Nomor : W.23.AHU. AHU.1.PR.03 - 1 /2024

No	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor BHP dan Kurator Negara Makassar	1 (satu) Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Pengirim,
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Oryza

NIP 197912012005011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANWIL SULAWESI SELATAN
BHP MAKASSAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berakhlak adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, norma-norma, dan hukum yang berlaku.



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Balai Harta Peninggalan Makassar

Jalan A.P. Pettarani no 112 Telp (0411) 453 281 Fax. (0411) 435 219
Laman : bhpmakassar.kemenkumham.go.id Surel : bhpmakassar@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini disajikan untuk memberi gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.

Di masa mendatang Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang



Makassar, 5 Januari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Oryza

NIP 197912012005011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Harta Peninggalan Makassar dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya berupa SDM dan anggaran, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Balai Harta Peninggalan Makassar pada tahun 2023. Dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 tersebut diuraikan sasaran-sasaran rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Unit Pelaksana Teknis Balai Harta Peninggalan Makassar. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2023, program kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk mendukung capaian masing-masing sasaran.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut, dimana Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, maka Balai Harta Peninggalan Makassar melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah dan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien Output sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum di wilayah
- b. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien.

Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:

- Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum;
- Persentase penyelesaian Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP.

Sasaran peningkatan kualitas administrasi yang tepat waktu dan akuntabel diukur melalui indikator kinerja. Sasaran terselenggaranya Administrasi Hukum Umum di Wilayah diukur melalui indikator kinerja, antara lain :

Dari sasaran Penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum target **86 %** di tahun 2023 terealisasi mencapai **100%** dan sasaran Penyelesaian Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP target **90%** terealisasi **100 %**.

Secara umum capaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar telah tercapai sesuai target sehingga dapat dikatakan kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai sasaran dan target yang diharapkan. Sedangkan untuk ***Realisasi Anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2023 sebesar Rp. 6,918,860,019,- mencapai rata-rata 99.75 % dari total anggaran sebesar Rp 6,936,119,000,-*** Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

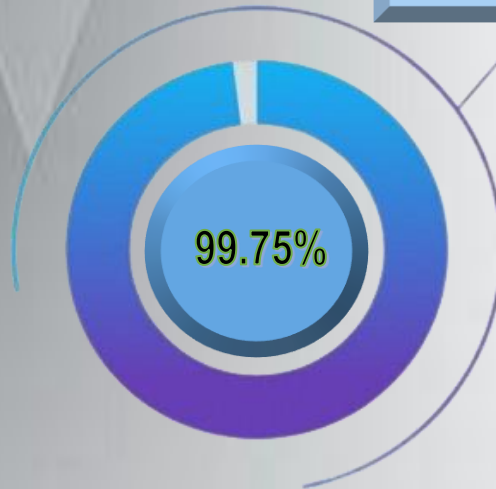
- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dan Unit Eselon II dan Unit Eselon I;
- 2) Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
- 3) Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yg lebih matang.

Untuk itu BHP Makassar akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

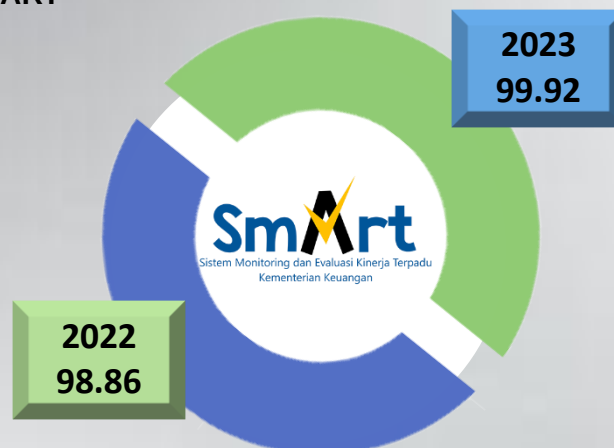
Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

A. KINERJA KEUANGAN

PAGU : Rp. 6.936.119.000
REALISASI : Rp. 6.918.860.019



B. PENILAIAN SMART



C. PENILAIAN IKPA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Aspek Strategis	7
E. Isu Strategis	7
F. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
LAMPIRAN	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Harta Peninggalan pada awal berdirinya adalah suatu Lembaga yang berasal dari Pemerintah Belanda. Menurut sejarah, Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Pada mulanya mereka adalah pedagang. Tetapi karena banyak pesaing dari Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar, maka untuk menghadapi persaingan itu, Belanda membentuk VOC.

Dengan semakin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia, timbul kebutuhan bagi anggotanya, khususnya dalam hal mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka Pemerintah Belanda membentuk suatu lembaga yang diberi nama Balai Harta Peninggalan yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624, berkedudukan di Jakarta.

Pada awal berdirinya, terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, dengan perwakilan-perwakilan yang ditetapkan oleh menteri Kehakiman sesuai pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stblt. 1872 No. 166 dan seorang anggota utusan Balai Harta Peninggalan Medan yang berkedudukan di Padang.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tersebut, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Masing-masing Balai Harta Peninggalan mempunyai meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Khusus untuk Balai Harta Peninggalan Makassar, wilayah kerjanya meliputi 13 (tiga belas) propinsi, antara lain : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Peraturan yang mengatur mengenai Balai Harta Peninggalan adalah : peraturan perundang-undangan mengenai hukum keluarga yang termuat dalam Buku I KUH Perdata (BW), ketentuan-ketentuan tentang pendirian maupun instruksi Balai Harta Peninggalan, peraturan rumah tangga atau peraturan jabatan, peraturan keuangan untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan, dan peraturan-peraturan lainnya.

B. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan teknis berkoordinasi langsung ke Unit Eselon I, yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu: Balai Harta Peninggalan Medan, Balai Harta Peninggalan Jakarta, Balai Harta Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Makassar.

Balai Harta Peninggalan Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) propinsi, antara lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

1. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan lebih terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata).

- b. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak DalamKandungan (pasal 348, 449 K. U. H. Perdata).
- c. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).
- d. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H. Perdata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- e. Mewakili dan Mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- f. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- g. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- h. Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang- undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana).
- i. Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat. (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah uraian tugas masing-masing dari unsur pada Susunan Organisasi yang ada pada Balai Harta Peninggalan Makassar: Susunan organisasi BHP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Harta Peningggalan Wilayah I;
- d. Seksi Harta Peninggalan Wilayah II;
- e. Seksi Harta Peninggalan Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

NO	STRUKTUR	FUNGSI
1	Kepala;	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan tugas teknis/non teknis sesuai peraturan Perundang-

		undangan dan prosedur yang berlaku di bidang Balai Harta Peninggalan
2	Subbagian Umum	Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP
3	Seksi Harta Peninggalan Wilayah I,II dan III	Melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (<i>afwezigheid</i>), harta peninggalan yang tidak terurus (<i>onbeheerde nalatenschap</i>), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.
6	Kelompok Jabatan Fungsional.	mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

Dibawah ini adalah bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan ;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**



Adapun komposisi jumlah pegawai Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan pemegang jabatan dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III : 1 orang

Eselon IV : 4 orang

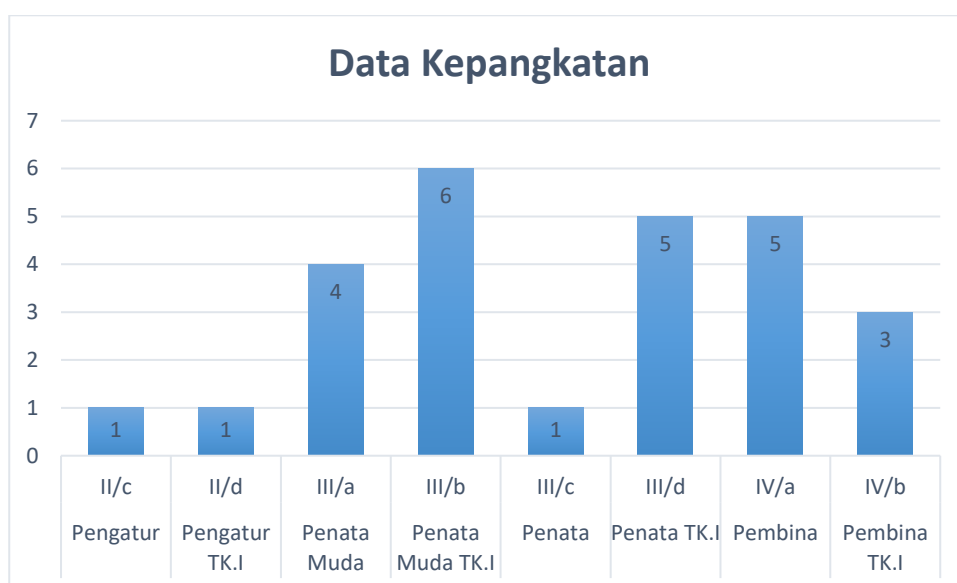
Rekapitulasi jumlah pegawai pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan pangkat/golongan, jabatan, dan jenis kelamin keadaan per bulan 30 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Data Pegawai

No	Nama Pegawai	NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	Oryza,S.H.,M.H.	19791201 200501 1 001	IV/a	Kepala
2	Sitti Jusniah, S.E., M.H.	19670512 200112 2 002	IV/a	Ka.Sub Bag Umum
3	Andi Malika, SH.,M.Si	19800608 200604 2 001	IV/a	Kasi HP Wil. I
4	Santi Kiay, SH	19771231 200212 1 001	III/d	Kasi HP Wil. II
5	Muh. Ibnu Qayyim, S.H.	19780316 200212 1001	III/d	Kasi HP Wil. III
6	Abd. Talib, S.H., M.H.	19640422 198903 1 001	IV/b	JFKK Madya
7	Efraim Tana, S.E., S.H., M.H.	19670729 198703 1 001	IV/b	JFKK Madya
8	Hasis Marollah, S.Sos., M.H.	19700712 199403 1 001	IV/b	JFKK Madya
9	Sofyan Arfah, S.H.	19741210 200312 1 001	IV/a	JFKK Madya
10	Hadariah, S.E., M.H.	19711127 200212 2 002	IV/a	JFKK Madya
11	Irma Sari, S.E, M.H.	19820816 200912 2 004	III/d	JFKK Muda
12	Andi Azwad Anshari Razak,S.H	19920507 201712 1 001	III/a	JFU
13	Nurul Afiah Idrus, S.H	19941024 201901 1 001	III/b	JFKK Pertama
14	Hardianti, S.H	19960403 201901 2 001	III/b	JFKK Pertama
15	Ahmad Rizal, S.H	19950417 201901 1 001	III/a	Analisis kepegawaian Pertama
16	Anhar, S.E	19781205 200912 1 001	III/d	Penyusun Laporan dan Evaluasi
17	Andi Ilham Yusran, S.E.	19860430 201012 1 001	III/d	Pengolah Data Laporan
18	Muh.Erwin, S.E.	19821226 200801 1 015	III/c	Penyusun Laporan Keuangan
19	Raoda	19681231 198803 2 001	III/b	Bendahara Penerima Satker
20	Abram David Levy Sitepu, S.H.	19930227 201212 1 001	III/b	Analisis Hukum
21	M. Fahmi Ruji, S.H.	19910122 201712 1 001	III/b	Analisis Hukum
22	Dian Vianny Bere, S.H.	19940524 201712 2 001	III/b	Analisis Hukum
23	Asriani Adam	19840528 200703 2 001	III/a	Pengolah Data Laporan
24	Sanintya Mayantya, S.Ak	19960310 202012 2 002	III/a	Penata Keuangan
25	Siti Nurul Ajizah, A.md.	19891011 201901 2 001	II/d	Pengelola Keuangan
26	Haris Maulana Rahim,A.md, Kom	19910810 202101 1 001	II/c	Pengelola BMN

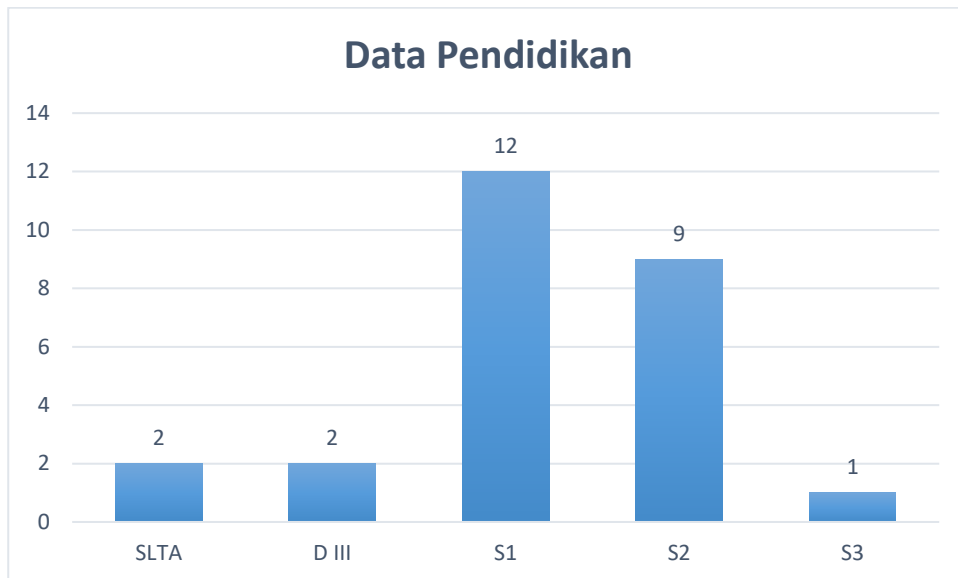
b. Kepangkatan

Gol/Ruang	Jml	Gol/Ruang	Jml	Gol/Ruang	Jml
II/a		III/a	4	IV/a	5
II/b	-	III/b	6	IV/b	3
II/c	1	III/c	1	IV/c	-
II/d	1	III/d	5	IV/d	-
Jml	2	Jml	6	Jml	8



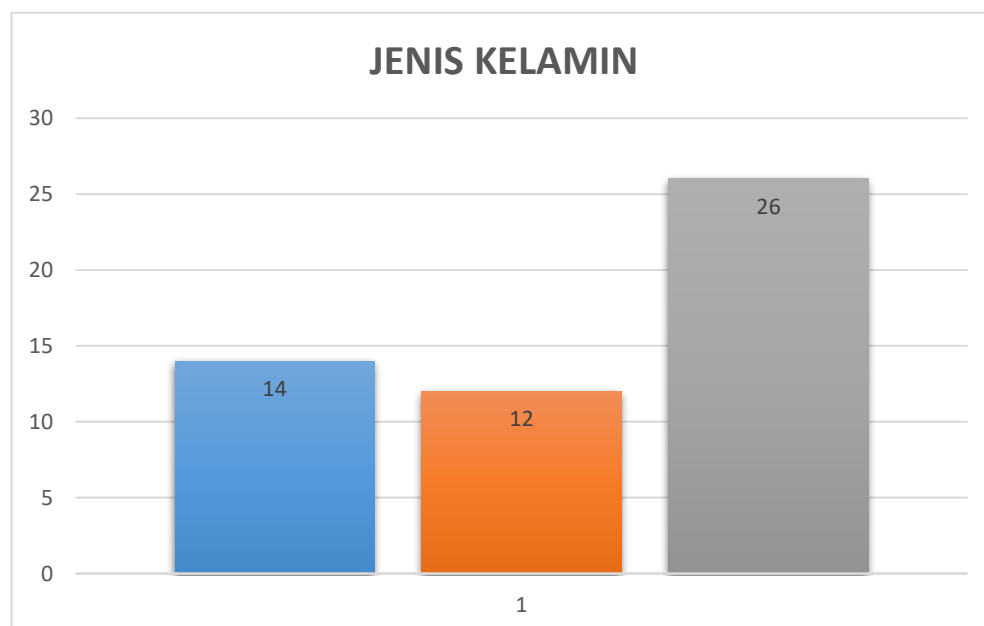
c. Pendidikan

Keterangan Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
SLTA	-	2	2
D III	1	1	2
(S1) Sarjana Ekonomi	3	-	3
(S1) Sarjana Akuntansi	-	1	1
(S1) Sarjana Hukum	4	4	8
(S2) Magister Hukum	4	4	8
(S2) Magister Sains	-	1	1
(S2) Magister Akuntansi			
(S3) Doctor	1		1
Jumlah	14	12	26



d. Jenis Kelamin

LAKI - LAKI	PEREMPUAN
14	12



C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Selain itu LKjIP ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
2. Memberikan informasi target dan capaian kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
3. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar.
4. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan teknis berkoordinasi langsung ke Unit Eselon I, yaitu Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Balai Harta Peninggalan Makassar mempunyai wilayah kerja meliputi 13 (tiga belas) propinsi, antara lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Aspek Strategis Balai Harta Peninggalan Makassar berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Balai Harta Peninggalan Makassar sebanyak 26 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Balai Harta Peninggalan Makassar yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Balai Harta Peninggalan Makassar memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, manajemen, administrasi, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi. Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi,

misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pencapaian kinerja pada Balai Harta Peninggalan Makassar diantaranya ada dari pihak Pengadilan Negeri - Niaga / Agama, Notaris, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Provinsi, Bank atau Lembaga Perbankan lainnya, BPJS, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Dinas kependudukan dan catatan sipil, serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal perlindungan dan pelaksanaan perwakilan atas orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya agar segala hak dan kewajiban orang-orang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

E. Isu Strategis

Berbagai permasalahan terkait dengan isu-isu strategis Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar terus menerus dilakukan perbaikan guna mendapatkan solusi dan penanganan melalui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dialokasikan anggarannya, antara lain :

NO	ISU STRATEGIS/ KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1.	Belum adanya peraturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan secara khusus; masih belum diatur keseragaman produk layanan antar BHP yang dapat menimbulkan potensi berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BHP	- Telah disusun beberapa Permenkumham terkait BHP secara khusus, antara lain Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan - Sedang dalam proses penyusunan Permenkumham berkaitan dengan tisi BHP lainnya yang diinisiasi oleh BHP dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

		• Perlu adanya UU Harta Peninggalan
2.	Belum optimalnya pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-performace	Mengikuti bimbingan perhitungan capaian kinerja dan pengisian aplikasi e-performance yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan
3.	Masih kurangnya pegawai dan Pemahaman pelaksana di bagian pelaporan keuangan,Kepegawaian dan Umum	Penyusunan dan pengusulan Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Jabatan pada BHP Makassar
4	Belum adanya layanan berbasis online yang bersifat orisinal yang mampu mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan	Melaksanakan koordinasi dengan Ditjen AHU maupun BHP lainnya untuk menemukan inovasi pelayanan yang seragam dan berkualitas, efektif, dan efisien, contohnya inovasi pendaftaran surat wasiat terbuka dengan stiker
5	Pengelolaan Arsip masih dalam proses pembenahan dan belum maksimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cara pengarsipan sesuai standar yang berlaku dan kurangnya SDM dalam pengelolaan arsip	Mengikuti Kegiatan Sosialisasi terkait Pembenahan Pengelolaan Kearsipan
6	Belum adanya MoU dengan dukcapil terkait integrasi data yang memudahkan kegiatan pelayanan di BHP; MoU dengan BPN/ATR terkait dengan tugas dan fungsi Afwezig yang ada di BHP.	• Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait • Melaksanakan sosialisasi dalam rangka penyebaran pengetahuan tugas dan • fungsi BHP dengan instansi-instansi terkait

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester I Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut;

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan di Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Harta Peninggalan di Tahun 2023

1. **Bab I Pendahuluan.**

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.**

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja.**

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- 3) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- 4) Terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur serta menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

4. Sasaran Strategis

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

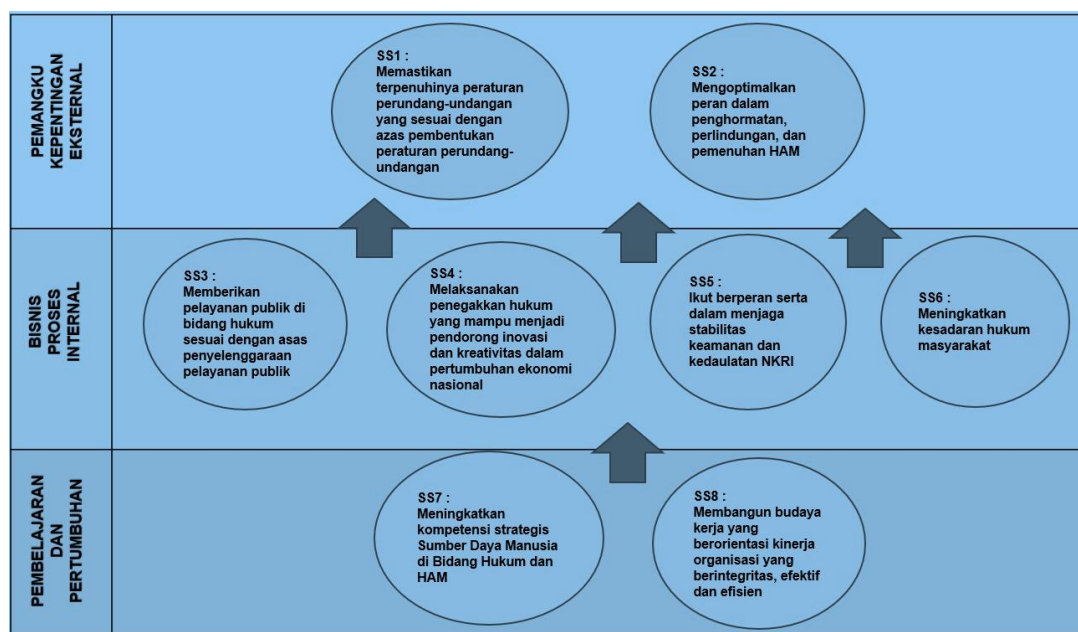
KODE SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.	Indeks kualitas perundang-undangan
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target. 2. Persentase capaian aksi HAM Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target.
Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.

(SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti. 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas. 3. Persentase menurunnya residivis. 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna. 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya). 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.
Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan. 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.
Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum. 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.	1. Nilai Reformasi Birokrasi. 2. Nilai SAKIP. 3. Nilai Maturnitas SPIP. 4. Opini Atas Laporan Keuangan. 5. Indeks Persepsi Integritas. 6. Persentase KTI yang disitasi.

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Perumusan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)
		3. Persentase menurunnya residivis
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
4	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
7	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM
8	Terselenggaranya pembinaan hukum	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum
9	Terwujudnya kesadaran dan	2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai

	pemahaman hukum masyarakat di wilayah	dengan peraturan perundang-undangan
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		5. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
		6. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
10	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi
11	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Balai Harta Peninggalan Surabaya menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan. Berikut Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Harta Peninggalan Surabaya yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Sasaran Program/Kegiatan Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Layananan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86 %
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,517,927,000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 2,517,927,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,418,192,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 4,418,192,000,-
TOTAL	Rp. 6,936,119,000,-

Jika ditarik hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Balai Harta Peninggalan Surabaya, maka dapat digambarkan pada tabel berikut.:

**Tabel Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM
dengan Sasaran Kegiatan pada Balai Harta Peninggalan Makassar**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN BALAI HARTA PENINGGALAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	1. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP	1. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hokum 2. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	1. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang hukum 2. Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

1. Tata Nilai

a. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional.



Gambar : Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

1. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
7. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam beKerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

b. Tata Nilai Pasti

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Profesional** adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras,

bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

- b) **Akuntabel** berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- c) **Sinergi** adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) **Transparan** adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) **Inovatif** adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Balai Harta Peninggalan Makassar yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Harta Peninggalan Makassar dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja

Tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023: Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat di Tabel dibawah :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN
DENGAN
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SULWESI SELATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN DLM RUPIAH
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Layananan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86 %	2,517,927,000,-
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90 %	4,418,192,000,-

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,517,927,000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 2,517,927,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,418,192,000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 4,418,192,000,-
TOTAL	Rp. 6,936,119,000,-

Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023, Balai Harta Peninggalan Makassar memperoleh anggaran sebesar **Rp. 6,936,119,000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar merupakan Satuan Kerja di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang secara teknis terkait langsung dengan Direktorat Administrasi Hukum Umum. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor BHP Makassar yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Pengukuran capaian kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar dengan perincian sebagai berikut:

I. Terwujudnya Layananan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

Indikatornya:

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum

Kegiatan layanan Balai Harta Peninggalan Makassar mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Tehnis berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Kegiatan ini bertujuan agar pelayanan prima kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan teknis pada Semester I Tahun 2023 dinilai cukup baik, dengan dilaksanakannya tahapan tugas fungsi teknis.

Kegiatan ini didasarkan pada banyaknya Penetapan/Putusan/Kutipan yang dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan Makassar dan menjadi syarat dalam pengurusan tiap Fungsi kepada masyarakat. Instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, Badan Pertanahan Nasional, serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun pelaksanaan Tugas Fungsi yang dilaksanakan Balai Harta Peninggalan Makassar yaitu pengurusan Pendaftaran Wasiat Umum/Pembukaan Wasiat Tertutup, Perwalian (selaku Wali Pengawas), Pengampuan (selaku Wali Pengawas), Onbeheerde, Pailit, Afwezigheid, dan Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi WNI keturunan Timur Asing. Sedangkan untuk 2 (dua) Tusi tambahan yang sudah memiliki dasar kuat melibatkan Balai Harta Peninggalan selaku pengelolanya, yaitu selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui dan selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat, sudah ada yang dilakukan namun belum sempurna dalam proses pendataan, karena masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan dan tindak lanjut dari lembaga terkait.

Perhitungan target kinerja yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini berbeda-beda sesuai dengan sub kegiatan yang dilaksanakan. Namun, dapat dipastikan bahwa target perencanaan didasarkan pada RKAKL-DIPA awal tahun 2023, sedangkan realisasi dilihat dari banyaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan capaian didapatkan dari rata-rata capaian yang dihasilkan dari seluruh sub kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Hukum tersebut.

Adapun capaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-1 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Tabel Layanan Balai Harta Peninggalan Makassar

No	Kegiatan	Jumlah	Pemohon
1	Perwalian	71	1. I GUSTI AYU NYOMAN TRISNA MAHAYUNI PUTRA 2. EFRIANI BINTI NASRUM 3. BAHARIA BINTI LABA 4. NI LUH PUTU OKTAVIANI SUDJATI 5. ETELVINA PAREIRA DE JESUS 6. HIKMA BINTI LAMBANG 7. ANDI DARAMULLING 8. ERNA BINTI LABANDI 9. SUSANA AMU TEPU 10. NOVIANITA ACHMAD 11. ZAINAL MONOARFA 12. ANASTASIA MAY KUNA 13. NI KETUT SUARNITI 14. NI WAYAN PUTRIANI 15. NI NYOMAN SUGIANI 16. NUR ANDAYANI 17. RAMALANG 18. RAHMAWATI DG FAMMA 19. VIVI MANGUNDAP 20. KIYATO 21. LINDA PURNAMA SAFITRI 22. SUSI SUSANTI ISIR 23. SULFIAN 24. HARIYANI 25. NURMAYA 26. YUNIAWATI 27. RAFAH 28. DARSIL 29. SUPRIYANTI 30. DALIATI BINTI MADEALI 31. ANDI BESSE FEBRIANTI 32. DEWA KADE ANOM WIJAYA 33. NURDIANA 34. SITA MULIANA YANTI 35. MULIATI 36. RUSMAWARTI 37. RABIA BINTI ABDUL GANI 38. DR.NITA MARIANA 39. DAHLIA IDRUS 40. SALISTIANI 41. SERLI SAKARIA 42. SURYANTI 43. ZULA KATILI 44. ANDI INDRA YULI 45. SYAMSIAH 46. JULI IDRAK 47. NURHAYATI BINTI SUDDING 48. HALWIAH 49. FATMAWATI 50. MARYANI 51. ISMANIAR 52. SAIDA HI DJAFAR 53. NURHASANAH A BASYIR 54. RABIAH 55. FAUZIAH USMAN 56. SULASMI MURDJIO

			57. SUSUNAH 58. YUL ASIA 59. MASASRUDDIN BIN HAKING 60. RUSMI BINTI MISE 61. MISWAINI BINTI BACO 62. HELIOS H LILIPOY 63. RINI INDAHSAARI 64. SITI RAUHUN BINTI SAHWAN 65. SEHMAN WIDIYANTO 66. IKA AGUSTINA BINTI HARTONO 67. SANAWATI BINTI NURDI SYARA 68. HASNAH 69. JUMAINI ALIAS IMINI 70. NASRUDDIN ANAS 71. TAMASE BIN LANGGAENG
2	Pengampuan	6	1. YOHANES HEPITUS MULIADI 2. FAHRIA KARTINI MUMU 3. DENIYARI RACHMAN, S.E. & HJ.NURWIDYATI 4. FANI RAMADANI 5. MEDI TAMORRON PASAU 6. DENIARY RACHMAN DAN KAWAN-KAWAN
3	Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat Tertutup	7	1. DINAH MANGADU 2. ALM.EMY HALIM AN AGUS HADI WIJAYA 3. AIKA ALIA DARUSSALAM 4. FIKASIANUS ICANG 5. YUL ASIA 6. NOTARIS CAMELIA DJAYA 7. NATHANIEL EDUARD SIE ALM PENGKY
4	Harta Tak Hadir		
	a. Transfer Dana		
	b. Jaminan Hari Tua		
5	Harta Tak Terurus	1	SOEPARMAN HERLAMBANG
6	Kepailitan		
7	Surat Keterangan Hak Waris	10	1. NY.ELLY LIANTI 2. STEVANUS LIE 3. YUNUS RAMBA 4. IRNAWATI 5. HENDRA 6. ANDIKA MELIANDI 7. IMELDA KEHIDATA 8. LIEN MEI LANG 9. DWI ANGREINI 10. THE BUN KOK
8	UPK	1	
Total		96	

Tabel Jenis layanan Balai Harta peninggalan Makassar

No	Layanan	JML Pemohon	Realisasi		Ket
			Selesai	Proses	
1	Layanan Perwalian dan Pengampuan				
	a Layanan Berita Acara Penyempahan Wali/	54	54	-	
	b Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	75	75	-	
	c Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	4	4	-	
	d Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	72	72	-	
	e Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan				
	f Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali				
	g Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali				
	h Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka				
2	Layanan Pendaftaran Surat Wasiat dan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW)				
	a Pendaftaran Akta Wasiat	7	7	-	
	b Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	10	10	-	
	c Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia				
	d Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	79	79	-	
3	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>)				
4	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (<i>Onbeheerde Nataleschap</i>)				
5	Layanan Kepailitan				
6	Layanan BPJS Tenaga Kerja				
7	Penerimaan Transfer Dana dari Bank				
Total		301	301	-	
Realisasi (%)		100			
Capaian (%)		116,27			

Penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan (301)}}{\text{Jumlah Permohonan (301)}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi (100\%)}}{\text{Target (86\%)}} \times 100\% = \mathbf{116.27\%}$$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Terwujudnya Layananan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86 %	100 %	116,27 %

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022;

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022	Capaian 2023	Ket
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	117 %	116,27 %	Realisasi pada Tahun 2022 dan 2023 adalah 100%. Penurunan capaian disebabkan karena terjadi peningkatan target yakni pada 2022 sebesar 84% dan pada 2023 sebesar 86%

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Kantor Balai Harta peninggalan Makassar Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator	Target (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82	84	86	88	106,05	117	116.27	-

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

d. Analisis Faktor Keberhasilan

Pencapaian Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum sesuai dengan standar mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa faktor penunjang diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan antara lain:
 - Rapat Koordinasi Peranan Kantor Wilayah Kemenkumham R.I dalam Memberikan Dukungan pada Tugas dan Fungsi BHP Makassar 1 s.d. 3 Maret 2023, Hotel Claro, Makassar Tahun Anggaran 2023 yang di hadiri 13 Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar
 - Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak di bawah umur dan Pengampunan Tahun 15 s.d. 17 Maret, Hotel Claro, Makassar Anggaran 2023 yang di hadiri 13 Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar.
 - Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BHP Makassar melalui media elektronik dengan materi Harta tak Hadir dan Harta tak Terurus, Layanan SKHW, Layanan Kepailitan, PKPU dan Peran BHP sebagai Kurator Negara 23 – 25 Mei 2023 di Radio Venus Makassar.
 - Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BHP Makassar melalui media elektronik dengan materi Pendaftaran, Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Rahasia / Tertutup tanggal 12 Juni 2023 di Radio Venus Makassar.
 - Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BHP Makassar melalui media elektronik dengan materi Layanan BHP terkait Transfer Dana tanggal 23 Juni 2023 di Radio Venus Makassar.
 - Kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi BHP Makassar melalui media elektronik dengan Peran BHP sebagai Wali Pengawas dalam Perwalian Anak dibawah Umur tanggal 26 Juni 2023 di Radio Venus Makassar.
2. Terlaksananya beberapa kegiatan Penandatanganan Memorandum Understanding (MoU) antara lain :
 - Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Manado

dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 9-11 Agustus 2023 di Propinsi Sulawesi Utara.

- Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dengan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanggal 13-15 September 2023 di Propinsi Nusa Tenggara Timur
- 3. Terlaksananya beberapa kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BHP Makassar dengan Pengadilan Agama antara lain :
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama se Wilayah V PTA Makassar (PA Makale, PA Belopa, PA Palopo, PA Masamba dan PA Malili tanggal 8 Juni 2023 Di Kab. Malili.
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa 12 Juni 2023 Di Sungguminasa Kab. Gowa
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama se Wilayah IV PTA Makassar (PA Jeneponto, PA Bantaeng, PA Bulukumba dan PA Selayar tanggal 23 Juni 2023 Di Kab. Bulukumba.
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BHP Makassar dengan 13 Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar (PA Barru, PA Sidrap, PA Parepare, PA Sinjai, PA Pangkajene, PA Watansoppeng, PA Watanpone, PA Enrekang, PA Pinrang, PA Maros dan PA Takalar tanggal 31 Juli 2023 Di Kota Makassar
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BHP Makassar dengan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 9 -11 Agustus 2023 di Propinsi Sulawesi Utara.
 - Perjanjian Kerja Sama antara BHP Makassar dengan Pengadilan Agama se-wilayah PTA Kupang tanggal 13-15 September 2023.

II. Terwujudnya Layanan Administrasi dan Fasilitatif layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan Efisien

Indikatornya:

Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP

Adapun capaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-1 adalah sebagai berikut :

- a. **Adapun capaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Program Ke-2 adalah sebagai berikut :**

1. Data Perencanaan ;

Adapun secara rinci alokasi anggaran pada Balai Harta Peninggalan Makassar berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA -013.03.2.408432/2023 Tanggal 30 November 2022 dapat dilihat dari data dibawah ini :

Program/Kegiatan/Output/Komponen/Sub	Anggaran DIPA Awal (Rp.)	Anggaran DIPA-Revisi (Rp.)
Program 013.03.07:		
Program Administrasi Hukum Umum	2,517,927,000	2,517,927,000
Kegiatan 5251:		
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
Output 5251.		
Koordinasi BHP Dengan Instansi Terkait	311,011,000	348,857,000
Komponen:		
051. Koordinasi dengan instansi terkait	197,580,000	275,223,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Peningkatan Manfaat layanan AHU melalui koordinasi dengan instansi terkait</i>	<i>197,580,000</i>	<i>275,223,000</i>
052. Koordinasi dengan unit pusat	113,431,000	73,634,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Peningkatan layanan AHU melalui koordinasi dengan Ditjen AHU</i>	<i>113,431,000</i>	<i>73,634,000</i>
Output 5251.		
Layanan Balai Harta Peninggalan	2,206,916,000	2,169,070,000
Komponen:		
051. Layanan Perwalian dan pengampuan	1,131,950,000	727,420,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Pengurusan Perwalian</i>	<i>1,063,530,000</i>	<i>701,326,000</i>
<i>B. Pengurusan Pengampuan</i>	<i>68,420,000</i>	<i>26,094,000</i>
052. Layanan pengurusan ketidakhadiran dan harta yang tidak ada kuasanya/harta tak terurus.	78,904,000	60,000
<i>Sub Komponen :</i>		

A. <i>Pengurusan Harta Kekayaan yang Dinyatakan Tidak Hadir</i>	24,894,000	30,000
B. <i>Pengurusan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus</i>	54,010,000	30,000
053. Layanan pendaftaran surat Keterangan wasiat (SKW) dan surat keterangan Hak Mewaris (SHM)	30,920,000	150,000
<i>Sub Komponen :</i>		
A. <i>Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)</i>	15,460,000	
B. <i>Pendaftaran dan Pembukaan Surat Wasiat</i>	15,460,000	150,000
054. Layanan kepailitan dan PKPU	375,314,000	112,408,000
<i>Sub Komponen :</i>	374,864,000	112,398,000
A. <i>Kurator dan Kepailitan</i>		
B. <i>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</i>	450,000	10,000
055. Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga	9,760,000	20,000
<i>Sub Komponen :</i>		
A. <i>Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua</i>	4,880,000	10,000
B. <i>Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal maupun Penerima</i>	4,880,000	10,000
056. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah	507,968,000	1,271,912,000
<i>Sub Komponen :</i>		
A. <i>Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah</i>	507,968,000	1,271,912,000
057. Publikasi/pameran/helpdesk	72,100,000	57,100,000
Program 013.03. Program Dukungan Manajemen	4,779,611,000	4,418,192,000
Kegiatan 5251: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP		
Output 5251.005 :		
Layanan BMN	61,464,000	61,464,000
Komponen:		

051. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	51,804,000	53,304,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN</i>	<i>51,804,000</i>	<i>53,304,000</i>
052. Pengadaan BMN	9,660,000	8,160,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Pengadaan BMN</i>	<i>9,660,000</i>	<i>8,160,000</i>
Layanan Hubungan Masyarakat		
051. Pengelolaan Kehumasan dan TI	3,000,000	3,000,000
Layanan Umum		
051. Layanan Urusan Kerumahtanggaan	258,728,000	258,728,000
<i>Sub Komponen :</i>		
<i>A. Pelaksanaan layanan urusan rumah tangga</i>	<i>147,067,000</i>	<i>258,728,000</i>
<i>B. Pencegahan dan penanganan Covid-19</i>	<i>111,661,000</i>	
Layanan Perkantoran	3,042,101,000	2,680,682,000
<i>Komponen:</i>		
001. Gaji dan tunjangan	2,147,459,000	1,786,040,000
<i>Sub Komponen:</i>		
<i>A. Pembayaran Gaji dan tunjangan</i>	<i>2,112,275,000</i>	<i>1,750,937,000</i>
<i>B. Uang Lembur</i>	<i>35,184,000</i>	<i>35,103,000</i>
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	894,642,000	894,642,000
<i>Sub Komponen:</i>		
<i>A. Kesehatan Pegawai</i>	<i>10,000,000</i>	<i>92,000</i>
<i>B. Pakaian dinas pegawai</i>	<i>9,400,000</i>	<i>9,400,000</i>
<i>C. Pemeliharaan gedung</i>	<i>187,460,000</i>	<i>181,982,000</i>
<i>D. Pemeliharaan peralatan perkantoran</i>	<i>33,300,000</i>	<i>25,580,000</i>
<i>E. Pemeliharaan kendaraan dinas</i>	<i>66,800,000</i>	<i>71,094,000</i>
<i>F. Langganan daya dan jasa</i>	<i>136,800,000</i>	<i>136,320,000</i>
<i>G. Jasa Pos</i>	<i>3,094,000</i>	<i>629,000</i>
<i>H. Keperluan Perkantoran</i>	<i>332,780,000</i>	<i>328,695,000</i>
<i>I. Honor Operasional Satker</i>	<i>82,920,000</i>	<i>83,510,000</i>
<i>J. Jamuan Tamu</i>	<i>32,088,000</i>	<i>57,340,000</i>
Layanan Sarana Internal	1,012,696,000	1,012,696,000
<i>Komponen:</i>		
051. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	218,000,000	211,100,000
052. Kendaraan Bermotor	380,939,000	379,339,000
053. Peralatan Fasilitas Perkantoran	413,757,000	422,257,000
Layanan Manajemen SDM	48,864,000	48,864,000
<i>Komponen:</i>	48,864,000	48,864,000
051. Pengelolaan Kepegawaian		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	77,196,000	77,196,000
<i>Komponen:</i>		
051. Penyusunan Rencana Program	26,232,000	70,168,000
052. Penyusunan Rencana Anggaran	50,964,000	7,028,000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50,364,000	50,364,000
<i>Komponen:</i>		

051. Evaluasi dan Pelaporan BHP	50,364,000	50,364,000
Layanan Manajemen Keuangan	225,198,000	225,198,000
Komponen:		
051. Pelaksanaan Anggaran	75,066,000	96,587,000
052. Akuntansi dan Pelaporan	75,066,000	59,258,000
053. Perbendaharaan	75,066,000	69,353,000
Jumlah	7.297.538.000	6.936.119.000

2. Data Laporan Keuangan terdiri atas :

➤ Laporan Keuangan Tahun 2023

Koordinasi

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Koordinasi dengan instansi terkait	275,223,000	274,585,650	637,350	99.77
052. Koordinasi dengan unit pusat	73,634,000	73,628,089	5,911	99.99
Total	348,857,000	348,213,739	643,261	99.82 %

Pelayanan Publik Lainnya

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Layanan Perwalian dan pengampuan	727,420,000	274,585,650	637,350	99.77
052. Layanan pengurusan ketidakhadiran dan harta yang tiadak ada kuasanya/harta tak terurus.	60,000	0	60,000	0
053. Layanan pendaftaran surat Keterangan wasiat (SKW) dan surat keterangan Hak Mewaris (SHM)	150,000	0	150,000	0
054. Layanan kepailitan dan PKPU	112,408,000	110,269,250	2,138,750	98.10
055. Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga	20,000	0	20,000	0
056. Sosialisasi/diseminasi /FGD/Rakor/Seminar/Webinar /workshop/pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah	1,271,912,000	1,271,441,443	470,557	99.96
057. Publikasi /pameran/helpdesk	57,100,000	57,100,000	0	100
Total	2,169,070,000	2,165,994,117	3,075,883	99.86%

Layanan BMN

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN	53,304,000	53,303,130	870	100
052. Pengadaan BMN	8,160,000	8,160,000	0	100
Total	61,464,000	61,463,130	870	100 %

Layanan Hubungan masyarakat

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Pengelolaan Humas dan TI				
• Pengelolaan Kehumasan dan TI	3.000.000	3,000,000	0	100
Total	3.000.000	3,000,000	0	100 %

Layanan Umum

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Layanan Urusan Kerumahtanggaan				
• Belanja barang non oprasional	3,000,000	3,000,000	0	100
• Belanja persediaan Barang Komsumsi	72,847,000	72,660,500	186,500	99.74
• Belanja Sewa	70,620,000	70,402,461	217,539	99.69
• Belanja Jasa Lainnya	111,661,000	111,282,717	378,283	99.66
• Belanja perijin dlm Kota	600,000	450,000	150.000	75.00
Total	2.588.728.000	257,795,678	932,322	99.64 %

- Terlaksanannya Layanan urusan Rumah Tangga antara lain:
- Honor Instruktur Senam Januari s.d Desember
- Belanja barang Persediaan

Uraian	Volume
Map Kain	6 pkt
Map printing	500 pkt
Tinta printing	1 th

- Terlaksanannya pengadaan Sewa Mesin Fotocopy Januari s.d Desember
- Langganan internet Januari s.d Desember

Layanan Perkantoran

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
001 Gaji dan Tunjangan	1,786,040,000	1,785,457,125	582,875	99.97
002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	894,642,000	892,935,561	1,706,439	99.81
Total	2,680,682,000	2,678,392,686	2,289,314	99.91

- Pakaian dinas Pegawai

NO	Uraian	Jumlah	Stel	Nilai
1	Pakaian dinas security	3 Orang	6 stel	Rp. 6.000.000,-
2	Pakaian pramubakti	2 Orang	4 stel	Rp. 1.840.000,-
3	Cleaning service	2 Orang	4 Stel	Rp. 1.560.000,-
Total				Rp.9.400.000,-

- Pemeliharaan Gedung

Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Pemeliharaan Rumah Dinas, Bangunan Gedung dan Halaman Kantor pada Balai Harta Peninggalan dengan Nomor SPK : W23.AHU.AHU.2.PB.02.03-31 Tanggal 7 Maret 2023.

NO	Uraian Pekerjaan	Nilai
1	Pemeliharaan Halaman	Rp. 13.600.000,-
2	Pemeliharaan bangunan rumah Dinas	Rp. 26.350.000,-
3	Pemeliharaan Bangunan gedung	Rp. 148.050.000,-
Total		Rp. 188.200.000,-

Layanan Sarana Internal

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Perangkat pengolah Data dan Komunikasi	211,100,000	210,750,000	350,000	99.83
052. Kendaraan bermotor	379,339,000	379,300,000	39,000	99.99
053. Peralatan Fasilitas Perkantoran	422,257,000	421,751,836	505,164	99.88
Total	1.012.696.000	1,011,801,836	894,164	99.91%

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Terlaksananya Pengadaan Laptop dengan nomor SP : W23.AHU.AHU.1-PB.02.03-27 Tanggal 1 Maret 2023

No	Nam Produk	Unit	Harga/Unit	Harga Kirim	Total Harga
1	4522100001- PEP- 014384508 Mybook Pro K5 (16N9	6	17.500.000,-	3.000.000	108.000.000,

- Pengadaan kendaraan Bermotor

Terlaksananya Pengadaan Roda 4 (empat) pada Balai Harta Peninggalan Makassar dengan surat pesanan Nomor ;W23.AHU.AHU 1-PB.02.03-19 tanggal 21 february 2023 dengan rincian ;

NO	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga
1	4912100001-KB2-04 7234135 Kijang Inova 2.0 G M/T	1	1	Rp. 379.300.000

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Terlaksananya Pengadaan peralatan mesin dengan Nomor SP : W23.AHU.AHU.1-PB.02.03-37 Tanggal 9 Maret 2023

No	Nama produk	Qty	Harga Satuan	Total Harga
1	AC 2 PK YN18WKJ	5	Rp. 14.300.000,-	Rp 71.500.000,-

NO	Nama Barang	Unit	Total harga
1	Microphone	3	Rp.407.751.836
2	Video conference	1	
3	Roll Opack	2	
4	CCTV	3	
5	Lemari Kayu Arsip	5	
6	Meja kerja Kayu	10	
7	Digital LED Running Text	2	

Layanan Manajemen SDM Internal

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Pengelolaan Kepegawaian				
• Pengeloaan Kepegawaian	48.864.000	2,107,940	2,107,940	95.69
Total	48,864,000	2,107,940	2,107,940	95.69 %

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Penyusunan Rencana program	70,168,000	70,151,274	16,726	99.98
052. Penyusunan Rencana Anggaran	7,028,000	6,970,000	58,000	99.17
Total	77,196,000	77,121,274	74,726	99.90%

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Evaluasi dan Pelaporan BHP				
• Evaluasi dan Pelaporan BHP	50.364.000	50,175,000	189,000	99.62
Total	50,364,000	50,175,000	189,000	99.62%

Layanan Manajemen Keuangan

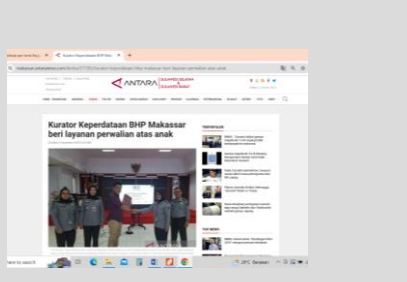
Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051. Pelaksanaan Anggaran	96,587,000	96,578,591	8,409	99.99
052. Akutansi dan Pelaporan	59,258,000	59,225,829	32,171	99.95
053. Perbendaharaan	69,353,000	69,348,070	4,930	99.99
Total	225.198.000	225,152,490	45,510	99.98

Terlaksanya Layanan Akuntansi, pelaporan dan Perbendaharaan, namun layanan Pelaksanaan Anggaran akan terealisasi di periode berikutnya.

3. Citra Positif BHP terdiri atas Pemberitaan positif dapat meliputi pemberitaan di media cetak (surat kabar, majalah, buletin), media cetak (surat kabar, majalah, bulletin) media elektronik (radio dan televise) maupun media online. Adapun Penyelenggaraan Citra Positif realisasinya telah melebihi dari target antara lain:

No	Tgl	Media, Link dan Judul	Dokumenetasi
1	16 februari 2023	Solusi News Id TIM WIL III Bahas Agenda Perwalian dan Pengawasan perwalian	
2	2 Maret 2023 19	Rakyat Sulsel Fajar.co.id Kemenkumham se-Indonesia Bagian Tengah dan Timur Diminta Perkuat Tusi BHP Makassar https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/03/02/kemenkumham-se-indonesia-bagian-tengah-dan-timur-diminta-perkuat-tusi-bhp-makassar/	
3	Jumat, 3 Maret 2023,	poskomalut.com saran Kakanwil Malut Untuk penguatan ORTA BHP Makassar https://poskomalut.com/saran-kakanwil-kemenkumham-malut-untuk-penguatan-orta-kanwil-bhp-makassar/	
4	Senin (27/3/2023).	integritasnews.com Studi Tiru di Balai Harta Peninggalan Medan, BHP Makassar Koordinasikan Pengurusan PKPU https://integritasnews.com/studi-tiru-di-balai-harta-peninggalan-medan-bhp-makassar-koordinasikan-pengurusan-pkpu/	
5	31 Juli 2023	Republikanews BHP Makassar Gandeng 13 Pengadilan Agama Dorong Maksimalisasi Tugas Perwalian Anak https://republikenews.co.id/bhp-makassar-gandeng-13-pengadilan-agama-dorong-maksimalisasi-tugas-perwalian-anak/	

6	1 Agustus 2023	antaranews.com BHP Makassar dan 13 Pengadilan Agama sesulsel kerjasama tugas perwalian https://makassar.antaranews.com/berita/495006/bhp-makassar-dan-13-pengadilan-agama-se-sulsel-kerja-sama-tugas-perwalian	 BHP Makassar dan 13 Pengadilan Agama se Sulsel kerja sama tugas perwalian Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel met...
7	10 Agustus 2023	Nawacita.com Kakanwil Kemenkumham Sulut Hadiri MOU dan PKS di BHP Makassar https://nawacitapost.com/nasional/daerah/2023/08/10/kakanwil-kemenkumham-sulut-hadiri-mou-dan-pks-di-bhp-makassar/	 BERITA TERBARU Menteri Budi Arie Oetomo Salings BTP Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Digital Tidak Ingatkan Perju Jalin Kerja Sama Antar Lembaga dengan Berbagai
8	10 Agustus 2023	TribunManado.co.id BHP Makassar Perluas Kerja Sama Perwalian di Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id dengan judul BHP Makassar Perluas Kerja Sama Perwalian di Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo, https://manado.tribunnews.com/2023/08/10/bhp-makassar-perluas-kerja-sama-perwalian-di-manado-sulawesi-utara-dan-gorontalo	 BHP Makassar Perluas Kerja Sama Perwalian di Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) kembali memperluas jalinan kerja sama dalam bidang Perwalian.
9	15 September 2023	SolusineWS.id BHP Makassar Jalin Kerjasama Urusan Perwalian dengan 14 PA Wilayah PTA Kupang https://solusineWS.id/bhp-jalin-kerjasama-urusan-perwalian-dengan-14-pa-wilayah-pta-kupang/	 BHP Makassar Jalin Kerjasama Urusan Perwalian dengan 14 PA Wilayah PTA Kupang KUPANG, SOLUSINEWS.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)...

10	15 September 2023	Antarantt.com Kemenkumham NTT dan BHP Makassar sosialisasi hak keperdataan anak bawah umur https://kupang.antaranews.com/berita/118560/kemenkumham-ntt-dan-bhp-makassar-sosialisasi-hak-keperdataan-anak-bawah-umur	
11	9 Desember 2023	Antara News Kurator keperdataan BHP Makassar beri Layanan perwalian atas Anak https://makassar.antaranews.com/berita/517392/kurator-keperdataan-bhp-makassar-beri-layanan-perwalian-atas-anak	
12	27 Desember 2023	Sertijab Kepala BHP, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Tekankan Koordinasi dan Komunikasi https://integritasnews.com/sertijab-kepala-bhp-kakanwil-kemenkumham-sulsel-tekanan-koordinasi-dan-komunikasi/	

Adapun Realisasi Indikator ke 2 yakni Penyelenggaraan Perencanaan, Laporan Keuangan, Citra Positif dan fasilitatif layanan Administrasi Hukum Umum pada Balai Harta Peninggalan Makasar bulan Januari s.d Desember Tahun 2023 :

No	Komponen Dukman	Satuan	Target 2023	Realisasi	Persentase (%)
1	Perencanaan Anggaran	Dok	2	2	100
2	Laporan keuangan	Dok	2	2	100
3	Pencitraan Positif	Berita	4	12	300
Realisasi					167

Penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi (167 \%)}{\text{Target (90 \%)}} \times 100\% = 185.55 \%$$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN (%)
2	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90 %	185.55

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2023 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022;

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022	Capaian 2023	Ket
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	111 %	185.55 %	Capaian pada Tahun 2023. mengalami kenaikan capaian disebabkan karena realisasi Pemberitaan Positif melalui media eksternal telah melebihi dari target

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Kantor Balai Harta peninggalan Makassar Tahun 2020-2024;

Sasaran Kegiatan /Indikator	Target (%)				Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP	90	90	90	90	100	111	185.55	-

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

d. Analisis Faktor Keberhasilan

Pencapaian sasaran kegiatan perencanaan, Laporan Keuangan dan citra Positif BHP sesuai dengan standar mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan ada beberapa faktor penunjang diantaranya :

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu.
2. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.
3. Realisasi Pemberitaan positif yang meliputi pemberitaan di media cetak (surat kabar, majalah, buletin), media elektronik (radio, televisi), maupun media online telah melebihi dari target.

B. Realisasi Anggaran

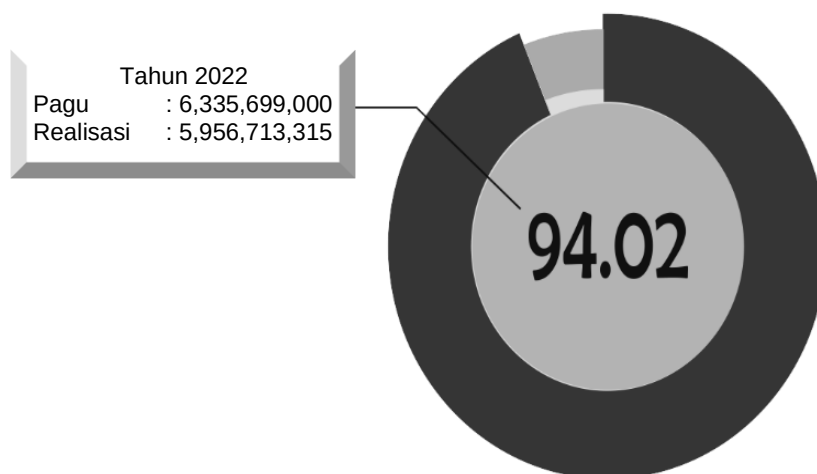
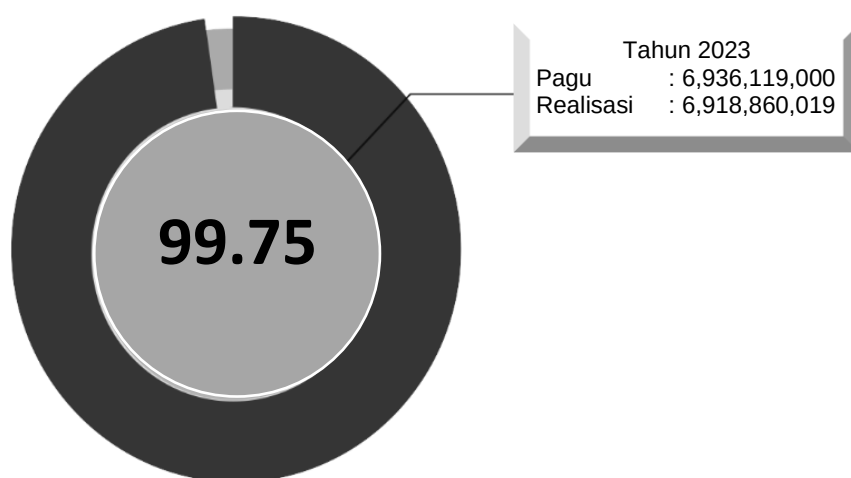
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Harta Peninggalan Makassar sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Balai Harta Peninggalan Makassar T.A 2023 Nomor DIPA -013.03.2.408432/2023 Tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp 6,936,119,000,-** hingga Desember 2023 Balai Harta Peninggalan Makassar telah berhasil merealisasikan sejumlah **Rp. 6,918,860,691,-** atau sebesar **99,75%**. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian %
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	2,147,459,000	1,859,450,546	288,008,454	86.59
Belanja Barang	2,664,256,000	2,591,835,390	72,420,610	97.28
Belanja Modal	1,523,984,000	1,505,427,379	18,556,621	98.78
Total	6,335,699,000	5,956,713,315	378,985,685	94.02

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian %
Tahun 2023				
Belanja Pegawai	1,786,040,000	1,784,056,105	1,983,895	99.89
Belanja Barang	4,137,383,000	4,121,601,078	15,781,922	99.62
Belanja Modal	1,012,696,000	1,011,801,836	894,164	99.91
Total	6,936,119,000	6,918,860,019	17,258,981	99.75

Sumber : Aplikasi Om Span Kementerian keuangan 2023



Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut data penyerapan Balai Harta Peninggalan Makassar per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran strategis Balai Harta Peninggalan Makassar.

Tabel : Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

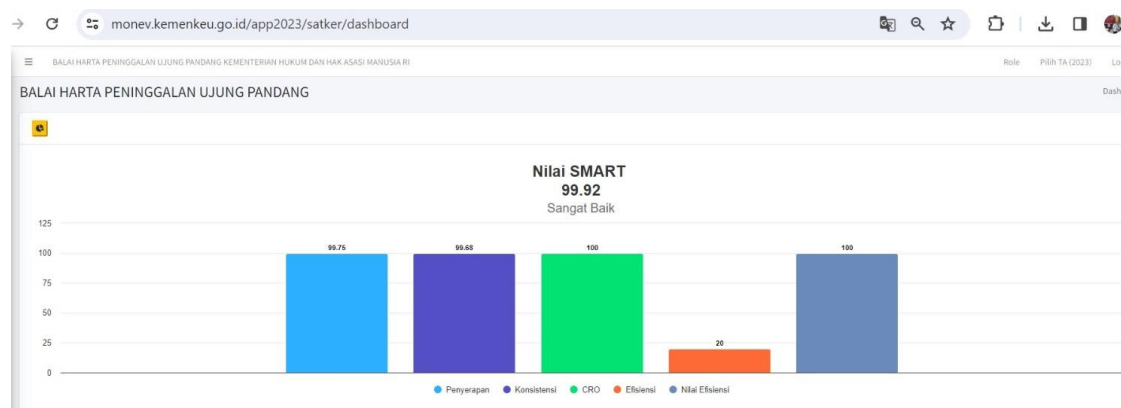
Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum			
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp. 2,517,927,000,-	Rp. 2,508,478,915	99.62
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp. 4,418,192,000,-	Rp. 4,410,381,104	99.82
TOTAL	Rp. 6,936,119,000,-	Rp. 6,918,860,019	99.75

C. Capaian Kinerja Anggran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Tahun 2023

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Gambar I. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA



Nilai Kinerja Anggaran Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2023 sebesar **99,92**

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

KPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 5%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%.

Gambar II Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	136	013	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	Nilai	100.00	81.97	100.00	97.50	100.00	99.59	100.00	100.00	97.91	100%	97.91
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.20	20.00	9.75	10.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.99		99.42					100.00			

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun Anggaran 2023 sebesar **97,91**

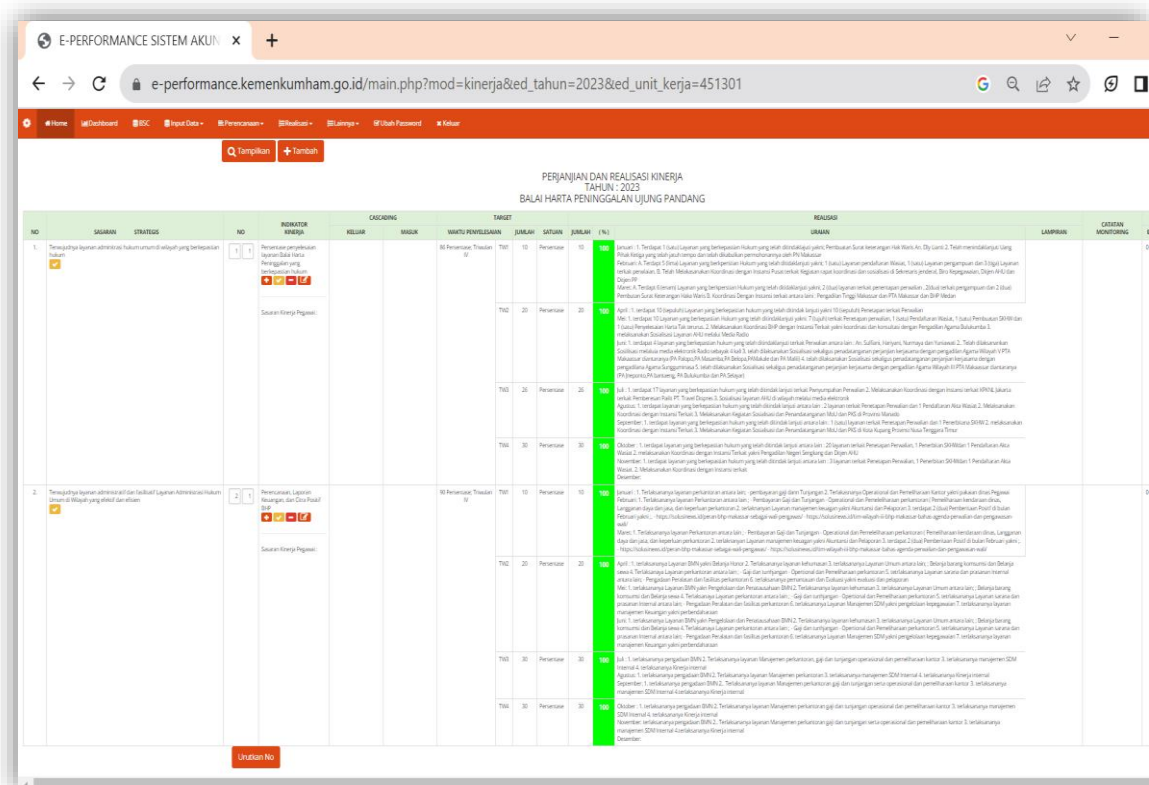
D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi eperformance Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar telah melakukan penginputan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 pada aplikasi eperformance setiap bulannya. Adapun Capaian eperformance Balai Harta Peninggalan Makassar secara keseluruhan telah memenuhi target.

Gambar III. Capture Capaian E-Performance Tahun 2023



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KUALITAS	KANTOR	MATERI	TARGET	JANGKA WAKTU	SITUASI	Jumlah	Status	Bulan	Tgl	Realisasi	Lampiran	Grafik Monitoring
1	Penyempurnaan sistem administrasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar	Penyempurnaan sistem administrasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar				80 Persentase Tindakan	10	Belum Realisasi	10						
2	Penyempurnaan sistem administrasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar	Penyempurnaan sistem administrasi hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar				80 Persentase Tindakan	10	Belum Realisasi	10						

2. Target Kinerja

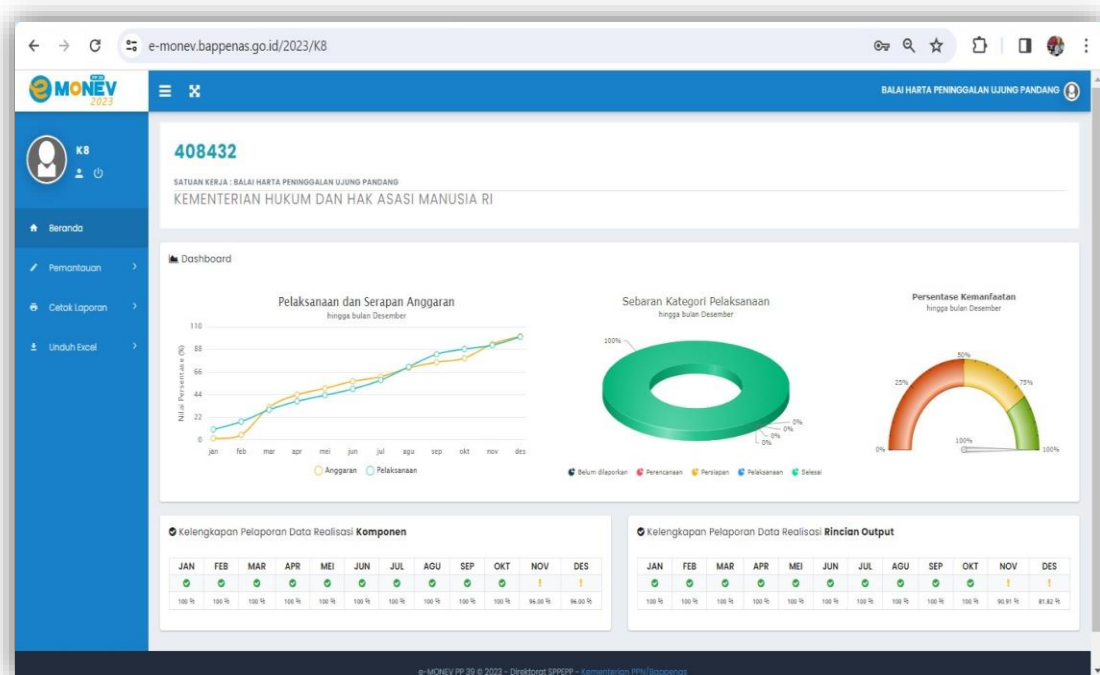
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : Nomor M.HH03.PR.01.03 Tahun 2022 Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Tahun 2023 merupakan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan target kinerja dilakukan oleh Kantor Wilayah melalui aplikasi monitoring target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman <https://kinerja.kemenkumham.go.id>

3. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi eMonev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

Gambar IV. Capture Capaian e-Monev Bappenas Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar adalah rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2023. LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada masing-masing kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar yang sudah cukup optimal, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kegiatan yang telah berjalan tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar tahun 2023 telah tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan dapat pula digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

B. Saran

Dari berbagai kendala yang dihadapi tahun 2023, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar di semester yang akan datang, yaitu :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) serta Instansi terkait lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah/kendala yang timbul dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut;
3. Peningkatan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di semua bidang guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Balai Harta peninggalan Makassar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis Keperdataan di Balai Harta peninggalan Makassar

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Balai Harta Peninggalan Makassar Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang